Empiricism Journal
https://journal-center.litpam.com/index.php/empiricism
email: empiric.journal@gmail.com

Vol. 6, No 3, Sep. 2025
e-ISSN: 2745-7613
pp. 1035-1041

Strategi Inovasi Pelayanan Publik untuk Penurunan Kemiskinan Ekstrem di Sumbawa Barat

Mulaini[1], & Umar[2]*
[1]Program Studi Manajemen Inovasi, Sekolah Pascasarjana, Universitas Teknologi Sumbawa, Jl. Olat Maras, Pernek, Moyo Hulu, Sumbawa, Indonesia 84371.
[2]Program Studi Bahasa dan Kebudayaan Inggris, Fakultas Psikologi dan Humaniora, Universitas Teknologi Sumbawa, Jl. Olat Maras, Pernek, Moyo Hulu, Sumbawa, Indonesia 84371.
Email Korespondensi: umar@uts.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi strategi inovasi pelayanan publik dan menganalisis faktor penghambatnya dalam upaya menurunkan kemiskinan ekstrem di Kecamatan Jereweh, Kabupaten Sumbawa Barat. Penelitian ini mengisi kekosongan kajian terkait efektivitas strategi inovasi publik di tingkat kecamatan secara komprehensif dalam konteks lokal, yang jarang diteliti secara terintegrasi. Menggunakan metode kualitatif studi kasus, data dikumpulkan selama tiga bulan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi dengan 10 orang informan kunci (pemangku kebijakan, aparatur, pelaksana, dan masyarakat). Data dianalisis menggunakan pendekatan analisis tematik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi strategi inovasi telah menunjukkan kemajuan melalui intervensi terpadu, meliputi koordinasi lokal dan layanan proaktif. Namun, efektivitas strategi ini secara signifikan terhambat oleh konstelasi faktor kompleks, mencakup keterbatasan anggaran dan SDM, problematika akurasi data, tantangan partisipasi sosio-kultural, serta fragmentasi kebijakan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun upaya inovatif telah berjalan, penanggulangan kemiskinan ekstrem memerlukan reorientasi pendekatan yang lebih holistik dan fundamental untuk mengatasi hambatan sistemik yang ada.

Kata kunci: Inovasi Pelayanan Publik; Kemiskinan Ekstrem; Tata Kelola Kolaboratif.

Public Service Innovation Strategy to Reduce Extreme Poverty in West Sumbawa

Abstract

This study describes the implementation of public service innovation strategies and analyzes the impediments to alleviating extreme poverty in Jereweh District, West Sumbawa Regency. It addresses a notable void in the literature concerning the comprehensive effectiveness of integrated public innovation strategies at the district level, a topic that has received limited scholarly attention. Employing a qualitative case study design, data were gathered over a three-month period via in-depth interviews, observation, and documentation with 10 key informants, comprising policymakers, officials, program implementers, and community members. A thematic analysis approach was utilized for data analysis. The findings reveal that the implementation of these innovative strategies has yielded progress through integrated interventions such as local coordination and proactive services. Nevertheless, their effectiveness is significantly impeded by a complex interplay of factors, encompassing budgetary and human resource limitations, persistent data accuracy problems, socio-cultural participation challenges, and policy fragmentation. The study concludes that while innovative efforts have been initiated, tackling extreme poverty necessitates a fundamental and more holistic reorientation of strategies to overcome these deep-seated systemic barriers.

Keywords: *Public Service Innovation; Extreme Poverty; Collaborative Governance.*

How to Cite: Mulaini, M., & Umar, U. (2025). Strategi Inovasi Pelayanan Publik untuk Penurunan Kemiskinan Ekstrem di Sumbawa Barat. *Empiricism Journal*, *6*(3), 1035–1041. https://doi.org/10.36312/ej.v6i3.3036

https://doi.org/10.36312/ej.v6i3.3036

Copyright© 2025, Mulaini & Umar
This is an open-access article under the CC-BY-SA License.

PENDAHULUAN

Kemiskinan ekstrem, yang didefinisikan sebagai kondisi ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, air bersih, dan sanitasi layak, merupakan tantangan pembangunan global yang persisten dan multidimensional. Sebagai isu sentral dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), pengentasan kemiskinan ekstrem menjadi prasyarat untuk mencapai tujuan pembangunan lainnya, termasuk kesehatan, pendidikan, dan kesetaraan (Lestari et al., 2023). Di Indonesia, tantangan ini terasa sangat

nyata, dengan adanya kantong-kantong kemiskinan yang memerlukan intervensi terfokus, seperti yang tecermin pada tingginya angka kemiskinan di Provinsi Bengkulu (Wahyudi et al., 2023). Kompleksitas masalah ini diperparah oleh fenomena stunting yang seringkali beririsan dengan kemiskinan, di mana faktor-faktor seperti sanitasi yang buruk menjadi determinan utama, menunjukkan bahwa kemiskinan adalah masalah sistemik yang terkait erat dengan kesehatan dan kondisi sosial (Warsidah et al., 2023).

Dalam konteks desentralisasi, pemerintah daerah memegang peran krusial dalam merancang kebijakan pengentasan kemiskinan. Namun, pendekatan konvensional yang seringkali bersifat top-down dan sektoral terbukti tidak cukup efektif untuk menjangkau akar masalah, terutama karena gagal menangkap heterogenitas karakteristik wilayah yang unik (Wahyudi et al., 2023). Oleh karena itu, inovasi dalam pelayanan publik menjadi sebuah keharusan, yang tidak hanya dipahami sebagai adopsi teknologi, tetapi juga sebagai perubahan strategis dalam koordinasi, penyasaran program, dan model intervensi yang lebih adaptif dan responsif terhadap kebutuhan riil masyarakat.

Berbagai studi menunjukkan bahwa pendekatan inovatif berbasis komunitas memiliki potensi keberhasilan. Intervensi penanganan stunting yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat seperti Kader Posyandu terbukti efektif karena pemahaman mereka terhadap konteks lokal (Nasution et al., 2022). Model-model seperti ini menunjukkan bahwa solusi yang paling efektif seringkali adalah yang mampu mengintegrasikan program pemerintah dengan struktur sosial yang sudah ada (Setiyawati et al., 2024; Nirmalasari, 2020). Meskipun demikian, masih terdapat celah signifikan dalam literatur. Secara spesifik, belum ada studi sebelumnya yang menganalisis integrasi program-program inovatif seperti Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) untuk validasi data, Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos), dan Tim Reaksi Cepat (TRC) Ambulans dalam satu kerangka inovasi kolaboratif berbasis desa, khususnya di wilayah Nusa Tenggara. Banyak penelitian yang ada cenderung berfokus pada "apa" yang dilakukan (daftar program), tetapi lebih sedikit yang mengkaji "bagaimana" inovasi tersebut dikoordinasikan, diimplementasikan, dan diterima dalam konteks sosio-kultural yang unik.

Untuk mengisi celah tersebut, penelitian ini menjadi krusial. Tujuannya adalah untuk menganalisis secara komprehensif strategi inovasi pelayanan publik dalam penanggulangan kemiskinan ekstrem di Kecamatan Jereweh. Secara lebih operasional, penelitian ini secara spesifik mengkaji indikator inovasi pelayanan publik pada empat aspek utama: (1) koordinasi multi-pihak, (2) intervensi sektor kesehatan, (3) mekanisme penyaluran bantuan sosial, dan (4) model pemberdayaan ekonomi lokal. Dengan mendeskripsikan implementasi yang ada dan mengidentifikasi faktor-faktor penghambatnya, penelitian ini pada akhirnya bertujuan merumuskan rekomendasi kebijakan berbasis bukti untuk penguatan program pengentasan kemiskinan ekstrem di tingkat tapak.

METODE

Metodologi yang digunakan secara sistematis untuk menjawab pertanyaan penelitian. Penjelasan mencakup desain penelitian, lokasi dan pemilihan informan, teknik pengumpulan data, analisis data, serta prosedur untuk menjamin validitas dan etika penelitian.

Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus (case study). Desain ini dipilih karena kemampuannya untuk memperoleh pemahaman yang mendalam, kaya, dan kontekstual mengenai fenomena yang kompleks dalam situasi dunia nyata (Creswell, J. W., & Creswell, 2018). Studi kasus memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi secara intensif "bagaimana" strategi inovasi diimplementasikan dan "mengapa" faktor-faktor penghambat tertentu muncul dalam konteks spesifik di Kecamatan Jereweh.

Lokasi dan Informan Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Kecamatan Jereweh, Kabupaten Sumbawa Barat, selama periode tiga bulan, dari Maret hingga Mei 2025. Lokasi ini dipilih karena merupakan salah satu fokus implementasi program pengentasan kemiskinan ekstrem di daerah tersebut.

Informan penelitian dipilih menggunakan teknik purposive sampling (pengambilan sampel bertujuan) untuk memastikan relevansi, kedalaman, dan keragaman perspektif.

Kriteria utama pemilihan adalah keterlibatan dan pengetahuan langsung informan terhadap desain dan implementasi strategi inovasi yang dikaji. Secara total, penelitian ini melibatkan 10 informan kunci.

Tabel 1. Rincian distribusi informan disajikan pada

Kategori Informan	Peran/Institusi	Kode Informan	Jumlah	Justifikasi Pemilihan
Pemangku Kebijakan	Pejabat Dinas Sosial, Bappeda, Camat	IPK1, IPK2 & IPC	3 Orang	Memahami desain, regulasi, dan tantangan strategis dari tingkat atas.
Pelaksana Program	Pendamping PKH, TKSK	IPP1 & IPP2	2 Orang	Memahami realitas, dinamika, dan hambatan implementasi di lapangan.
Penerima Manfaat	Masyarakat Kategori Ekstrem	IPM1, IPM2, IPM3, IPM4 & IPM5	5 Orang	Memberikan perspektif langsung mengenai pengalaman, kebutuhan, dan dampak program
Total			**10 Orang**	

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui triangulasi teknik untuk meningkatkan kedalaman dan validitas temuan. Tiga teknik utama yang digunakan adalah:

1) Wawancara Mendalam Semi-Terstruktur: Dilakukan dengan semua informan untuk menggali persepsi, pengalaman, makna, dan tantangan yang mereka hadapi secara mendalam.
2) Observasi Partisipatif: Peneliti terlibat dalam beberapa kegiatan layanan (seperti Musdesus atau penyaluran bantuan) untuk mengamati secara langsung proses, interaksi, dan dinamika yang terjadi di lapangan.
3) Analisis Dokumen: Menganalisis dokumen relevan seperti laporan program, Standard Operating Procedures (SOP), dan data kemiskinan untuk melengkapi dan memverifikasi informasi dari wawancara dan observasi.

Analisis Data

Data yang terkumpul dianalisis menggunakan metode analisis tematik (thematic analysis) sebagaimana yang dipandu oleh Braun & Clarke (2022). Proses analisis ini dilakukan secara sistematis melalui beberapa tahapan, meliputi: (1) familiarisasi data (membaca transkrip berulang kali), (2) kodifikasi data (memberi label pada segmen data yang relevan), (3) pencarian dan identifikasi pola-pola (tema), (4) pengembangan dan pendefinisian tema, serta (5) interpretasi untuk menjawab pertanyaan penelitian secara komprehensif.

Validitas dan Etika Penelitian

Untuk menjamin kredibilitas dan kepercayaan (trustworthiness) temuan, penelitian ini menerapkan beberapa prosedur. Validitas data ditingkatkan melalui triangulasi (menggunakan berbagai sumber data) dan member checking. Proses member checking dilakukan dengan menyajikan kembali interpretasi awal kepada beberapa informan kunci untuk memastikan bahwa temuan peneliti akurat dan sesuai dengan perspektif mereka.

Selain itu, seluruh proses penelitian ini mematuhi prinsip-prinsip etika. Peneliti memperoleh informed consent (persetujuan setelah penjelasan) dari semua partisipan sebelum wawancara. Anonimitas informan dijaga dengan menggunakan kode (seperti pada Tabel 1), dan kerahasiaan semua data yang diberikan dijamin sepenuhnya dalam pelaporan hasil penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara terperinci analisis disusun untuk menjawab dua pertanyaan utama penelitian: (1) bagaimana strategi inovasi pelayanan publik untuk penanggulangan kemiskinan ekstrem diimplementasikan di Kecamatan Jereweh, dan (2) apa saja faktor-faktor penghambat yang membatasi efektivitasnya. Untuk memudahkan pemahaman, temuan disajikan dalam dua bagian utama: deskripsi strategi inovasi yang telah berjalan, diikuti oleh analisis mendalam mengenai konstelasi faktor penghambat yang bersifat sistemik.

Untuk memberikan gambaran umum, ringkasan strategi inovasi beserta tantangan utamanya disajikan pada Tabel 2 di bawah ini.

Tabel 2. Ringkasan Strategi Inovasi Beserta Tantangan

Area Inovasi	Bentuk Implementasi	Dampak Positif yang Teridentifikasi	Faktor Penghambat Utama
Koordinasi & Data	Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) untuk validasi data.	Peningkatan akurasi data sasaran; partisipasi warga dalam pendataan.	Akurasi data DTKS masih menjadi isu; fragmentasi kebijakan antar dinas.
Sektor Kesehatan	Tim Reaksi Cepat (TRC) Ambulans; Kelompok Peduli Stunting.	Layanan proaktif (jemput bola); peningkatan aksesibilitas bagi kelompok rentan	Keterbatasan SDM kesehatan; jangkauan geografis yang sulit.
Bantuan & Pemberdayaan	Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos); Dana Bergulir untuk modal usaha.	Akses layanan sosial lebih dekat; integrasi bantuan dengan pemberdayaan ekonomi.	Keterbatasan anggaran; partisipasi masyarakat cenderung pasif; literasi finansial rendah.

Implementasi Strategi Inovasi: Koordinasi, Intervensi, dan Pemberdayaan

Hasil penelitian mengidentifikasi bahwa Pemerintah Kecamatan Jereweh telah menerapkan serangkaian strategi inovasi yang berupaya mengatasi kemiskinan ekstrem secara multisektor, bergeser dari model pasif ke proaktif.

1. **Inovasi pada Level Koordinasi: Validasi Data Melalui Musdesus**

   Inovasi fundamental yang ditemukan adalah penggunaan mekanisme Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) sebagai forum untuk validasi data dan penyasaran bantuan. Mekanisme ini memungkinkan adanya verifikasi partisipatif terhadap data penerima manfaat, sehingga mengurangi risiko eksklusi dan inklusi yang keliru. Seperti yang diungkapkan oleh seorang pejabat kecamatan:

   "Musdesus... memastikan masyarakat masih layak di anggap miskin... Masyarakat miskin bisa mengoreksi data dan menyampaikan kondisi mereka", (IPC, Wawancara, 19 Mei 2025).

   Praktik ini menunjukkan pergeseran penting menuju tata kelola data yang lebih transparan dan akuntabel di tingkat desa.

2. **Inovasi pada Level Layanan: Intervensi Proaktif Kesehatan dan Sosial**

   Di tingkat layanan, inovasi bergerak ke arah model "jemput bola". Di sektor kesehatan, inisiatif seperti Tim Reaksi Cepat (TRC) Ambulans menunjukkan pergeseran dari layanan yang menunggu pasien menjadi layanan yang aktif mendatangi warga, sebuah praktik yang sangat dianjurkan untuk meningkatkan aksesibilitas bagi kelompok rentan (Sari, 2023).

   Di sektor bantuan sosial dan pemberdayaan, pembentukan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) di tingkat desa menjadi inovasi kunci. Puskesos berfungsi sebagai pusat layanan terpadu yang mendekatkan akses dan mengintegrasikan berbagai program, termasuk kolaborasi dengan pihak swasta. Integrasi antara bantuan sosial (seperti dana bergulir) dengan program pemberdayaan ekonomi keluarga terdampak stunting adalah contoh nyata pendekatan yang lebih berkelanjutan (Nurhayati, S., & Hidayat, 2024).

Konstelasi Faktor Penghambat: Dari Anggaran hingga Birokrasi

Meskipun berbagai inovasi telah diterapkan, efektivitasnya masih terhambat secara signifikan oleh serangkaian faktor yang kompleks dan saling terkait. Analisis mendalam mengidentifikasi empat arena problematika utama.

1. **Keterbatasan Sumber Daya: Anggaran dan Kapasitas SDM**

   Hambatan paling mendasar adalah keterbatasan sumber daya finansial dan manusia. Meskipun ada alokasi anggaran nasional yang masif untuk kemiskinan (Harahap, 2023), penyerapannya di tingkat tapak seringkali tidak optimal. Masalah ini diperparah oleh keterbatasan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM). Seperti yang ditemukan dalam studi lain, aparat di tingkat bawah seringkali "tidak memiliki pemahaman yang cukup" untuk menerjemahkan kebijakan makro yang kompleks (Anirwan, 2022).

   "Jujur saja, kebijakan dari pusat itu seringkali datang menggunakan 'bahasa langit'. Petunjuk teknisnya (Juknis) tebal, istilahnya rumit, dan asumsinya semua orang di sini adalah ahli kebijakan. Staf saya di lapangan itu kemampuannya eksekutor, mereka butuh arahan yang jelas: 'lakukan A, B, C'. Ketika mereka harus menafsirkan sendiri program yang kompleks, di situlah sering terjadi salah paham dan implementasi jadi tidak optimal. Kapasitas mereka terbatas untuk menerjemahkan, bukan untuk bekerja, (IPC, Wawancara, 19 Mei 2025)"

   Temuan ini sejalan dengan laporan Bank Dunia (*World Bank*) mengenai implementasi program sosial, yang seringkali menyoroti bahwa 'last-mile delivery challenges'—tantangan di tingkat paling bawah—disebabkan oleh kapasitas aparatur lokal yang terbatas untuk menerjemahkan kebijakan menjadi aksi mikro yang efektif.

2. **Problematika Data dan Kesenjangan Digital**

   Ketidakakuratan data penerima manfaat masih menjadi isu krusial yang membuat intervensi menjadi tumpul. Keterbatasan akses terhadap teknologi digital memperburuk masalah ini. Banyak wilayah terpencil masih kekurangan infrastruktur internet, yang menghambat penyaluran bantuan (Astuti, 2024). Lebih jauh, rumah tangga tanpa akses internet memiliki peluang menjadi miskin ekstrem secara signifikan lebih tinggi, mengindikasikan bahwa ketertinggalan digital secara langsung menyebabkan eksklusi ekonomi (Suryadi, 2022). Fenomena digital divide ini bukanlah isu lokal semata, melainkan tantangan global yang diakui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai penghalang utama pencapaian SDGs.

3. **Hambatan Sosio-Kultural: Partisipasi Pasif dan Perilaku**

   Rendahnya kesadaran dan partisipasi aktif dari masyarakat menjadi penghambat serius. Terdapat kecenderungan masyarakat untuk bersikap pasif dan hanya menunggu bantuan, sebuah perilaku yang juga ditemukan oleh (Anirwan, 2022). Seperti yang dikeluhkan oleh seorang pendamping program lapangan yang telah bertahun-tahun bekerja di wilayah tersebut:

   “Ini penyakit lama, Pak. Puluhan tahun program bantuan datang silih berganti. Niatnya baik, tapi efek sampingnya, mentalitas 'menadah' itu jadi kuat. Setiap ada masalah, solusinya selalu bertanya, 'Bantuannya mana?' bukan 'Apa yang bisa kita kerjakan bersama?' Inisiatif dari bawah itu jadi tumpul. Program pemberdayaan seringkali hanya dianggap sebagai formalitas untuk mencairkan bantuan saja. (IPP1, Wawancara, 19 Mei 2025)"

   Sikap ini diperparah oleh tingkat literasi yang rendah. Tingkat buta aksara, misalnya, merupakan prediktor kuat kemiskinan ekstrem karena menghambat kemampuan untuk meningkatkan kapasitas ekonomi dan kerentanan terhadap penipuan (Suryadi, 2022). Akibatnya, masyarakat lebih berfungsi sebagai objek pasif daripada subjek aktif pembangunan, yang pada akhirnya mengurangi rasa kepemilikan dan keberlanjutan program.

4. **Fragmentasi Kebijakan dan Birokrasi Lintas Sektor**

   Terakhir, efektivitas inovasi dilemahkan oleh koordinasi lintas sektor yang belum optimal dan regulasi yang kaku. Tumpang tindih program antar instansi menjadi cerminan

dari "belum optimalnya sinergi lintas sektor" yang menyebabkan fragmentasi kebijakan di lapangan (Astuti, 2024). Dalam terminologi akademis, kondisi ini disebut sebagai perilaku antarorganisasi yang tidak efektif akibat lemahnya komitmen dan koordinasi (Anirwan, 2022). Regulasi program yang kaku dari pusat seringkali tidak sesuai dengan kondisi riil di lapangan, memaksa birokrat di level jalanan (street-level bureaucrats) bekerja dalam kerangka yang tidak fleksibel.

KESIMPULAN

Implementasi strategi inovasi pelayanan publik di Kecamatan Jereweh telah berhasil menunjukkan kemajuan signifikan dalam upaya menurunkan kemiskinan ekstrem melalui serangkaian intervensi terpadu seperti Musdesus, Puskesos, dan layanan proaktif lainnya. Inovasi-inovasi ini berhasil meringankan beban ekonomi jangka pendek dan meningkatkan aksesibilitas layanan bagi sebagian masyarakat. Namun, penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas jangka panjang dari strategi tersebut masih terhambat secara fundamental oleh konstelasi faktor penghambat yang bersifat sistemik dan kompleks. Hambatan ini meliputi keterbatasan anggaran dan kapasitas SDM, problematika akurasi data yang persisten, partisipasi masyarakat yang cenderung pasif akibat faktor sosio-kultural, serta fragmentasi kebijakan dan birokrasi yang kaku. Akibatnya, transformasi struktural yang diperlukan untuk membawa masyarakat keluar dari siklus kemiskinan secara berkelanjutan belum sepenuhnya tercapai.

Secara teoretis, penelitian ini memberikan dua kontribusi penting bagi literatur administrasi publik dan studi pembangunan. Pertama, studi ini menegaskan bahwa pada level mikro (kecamatan), keberhasilan intervensi tidak diukur dari kecanggihan program individual, melainkan dari kemampuan untuk membangun ekosistem pendukung yang mengintegrasikan data, layanan, dan partisipasi. Kedua, temuan ini memperkuat relevansi teori birokrasi level jalanan (street-level bureaucracy), yang menyoroti bagaimana kapasitas dan diskresi aparat di lapangan menjadi penentu krusial antara keberhasilan dan kegagalan sebuah kebijakan. Oleh karena itu, mengatasi kemiskinan ekstrem bukan sekadar soal memperbaiki program, melainkan mereformasi ekosistem yang melingkupinya.

REKOMENDASI

Berdasarkan kesimpulan tersebut, direkomendasikan tiga pilar strategi kebijakan yang bersifat operasional dan saling terkait untuk mengatasi akar permasalahan secara holistik:

1) Membentuk Tata Kelola Kolaboratif yang Terlembagakan.
   Untuk mengatasi fragmentasi program, Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat perlu membentuk secara formal "Forum Koordinasi Lintas Sektor Penanggulangan Kemiskinan" yang mengintegrasikan perencanaan, penganggaran, dan sistem data dari dinas-dinas kunci (Sosial, Kesehatan, Pendidikan, Bappeda) dengan pemerintah kecamatan dan desa. Forum ini harus memiliki mandat yang jelas untuk menyinkronkan data dan program, sehingga menghindari tumpang tindih dan memastikan intervensi yang konvergen.
2) Melakukan Investasi Ganda pada Kapasitas Manusia.
   Untuk menjawab tantangan SDM dan partisipasi pasif, diperlukan investasi pada dua level. Bagi aparatur, perlu ada program peningkatan kapasitas berkelanjutan yang berfokus pada manajemen inovasi, analisis data, dan keterampilan fasilitasi komunitas. Bagi masyarakat, perlu dirancang program literasi (termasuk literasi finansial dan digital) serta pemberdayaan yang partisipatif untuk menumbuhkan inisiatif dan kemandirian dari bawah, mengubah mereka dari objek menjadi subjek pembangunan.
3) Merancang Kerangka Regulasi yang Adaptif dan Berbasis Bukti.
   Untuk mengatasi kekakuan birokrasi, perlu dirumuskan kerangka regulasi yang lebih adaptif (adaptive governance). Ini dapat diwujudkan dengan memberikan fleksibilitas yang lebih besar bagi pelaksana di tingkat lokal untuk menyesuaikan kriteria dan mekanisme penyaluran bantuan sesuai dengan kondisi riil di lapangan. Selain itu, perlu dibangun mekanisme umpan balik (feedback loop) yang sistematis dari masyarakat ke perumus kebijakan untuk memastikan bahwa inovasi dan regulasi di masa depan dirancang berdasarkan bukti dan pengalaman nyata.

DAFTAR PUSTAKA

Anirwan, A. (2022). *Implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kota Makassar [Disertasi doktoral, Universitas Hasanuddin]*. Universitas Hasanuddin Makassar.

Astuti, D. (2024). Strategi Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Provinsi Sulawesi Tengah: Pendekatan Konvergensi dan Inovasi Program. *SOSMANIORA (Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora)*, *3*(3), 355–363.

Braun, V., & Clarke, V. (2022). *Thematic analysis: A practical guide.* SAGE Publication.

Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches (5th ed.).* SAGE Publications.

Harahap, M. (2023). Analisis penanggulangan kemiskinan ekstrem di Kota Medan. *Journal Economy and Currency Study (JECS)*, *5*(2), 85–94.

Lestari, P. I., Robiani, B., & Sukanto, S. (2023). Kemiskinan Ekstrem, Ketimpangan Dan Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia. *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, *11*(2), 1739–1752.

Nasution, B., Zainudin, J. & J. (2022).). Prevention of Early Stunting Through Family Posyandu in Sape District, Bima Regency. *Empiricsm Journal*, *3*(2), 214–220.

Nirmalasari, N. O. (2020). Stunting pada Anak: Penyebab dan Faktor Risiko Stunting di Indonesia. *Qawwam: Journal for Gender Mainstreaming*, *14*(1), 19–28.

Nurhayati, S., & Hidayat, R. (2024). Integrasi Bantuan Sosial dan Pemberdayaan Ekonomi: Strategi Berkelanjutan untuk Keluarga Terdampak Stunting. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, *12*(3), 210–225.

Sari, P. (2023). Pemahaman gizi masyarakat NTB terhadap pangan lokal. *Jurnal Gizi Dan Kesehatan, 15*(2), 112–125.

Setiyawati, M. E., Ardhiyanti, L. P., Hamid, E. N., Muliarta, N. A. T., & Raihanah, Y. J. (2024). Studi Literatur: Keadaan Dan Penanganan Stunting Di Indonesia. *IKRAITH-HUMANIORA*, *8*(2), 179–186.

Suryadi, D. (2022). Karakteristik Rumah Tangga Miskin Ekstrem di Propinsi Jawa Barat. *Jurnal Ilmiah Manajemen Publik Dan Kebijakan Sosial*, *6*(2), 108–121.

Wahyudi, R., Fauzi, Y. & R. J. (2023). Analisis Kemiskinan Ekstrem Provinsi Bengkulu Menggunakan Metode Geographically Weighted Regression (GWR) dengan Pembobot Adaptive Gaussian Kernel dan Adaptive Bi-Square. *Journal of Mathematics UNP*, *8*(2), 134–149.

Warsidah, W., Ayyash, M. Y., Priani, W., & Satyahadewi, N. (2023). Analisis Statistik Faktor-faktor yang Mempengaruhi Angka Stunting di Kalimantan Barat. *Empiricism Journal*, *4*(2), 432–441